

SINKRONISASI MUATAN KURIKULUM LPTK DAN KURIKULUM SEKOLAH MITRA PPL

BORNOK SINAGA

Abstrak

PPL memiliki posisi sentral dalam perkuliahan prodi pendidikan di LPTK, maka sudah sewajarnya mendapat perhatian khusus di dalam proses pendidikan. Pendidikan juga harus menghadapi kenyataan bahwa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) berkembang sangat cepat. Oleh karena itu seringkali para perancang kurikulum bingung mana yang harus diprioritaskan dalam pendidikan. Sesungguhnya pengembangan kurikulum harus bergerak *bottom up approach*, dimulai dari pengenalan karakteristik peserta didik dan kondisi sekolah yang nyatanya sangat heterogen sampai pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kesiapan menghadapi tantangan global. Pemberdayaan guru dan sekolah dalam pengembangan kurikulum adalah kata kunci keberhasilan proses pendidikan. Tulisan ini terbatas pada pemaparan tentang (1) kedudukan PPL dalam kurikulum LPTK, (2) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), (3) Sinkronisasi Muatan Kurikulum LPTK dan KTSP di sekolah mitra PPL.

Kata Kunci: *Sinkronisasi Muatan Kurikulum, Kurikulum, Kurikulum LPTK, Kurikulum Sekolah, PPL, KTSP.*

A. PENDAHULUAN

Program Pengalaman Lapangan (PPL) idealnya merupakan muara pertama matakuliah keahlian berkarya (MKB). Bahkan merupakan muara seluruh matakuliah, karena dalam wahana PPL itulah kompetensi secara utuh dijewantahkan secara profesional. PPL merupakan *melting pot* dari seluruh matakuliah yang dipelajari mahasiswa. Dalam melaksanakan PPL sebenarnya mahasiswa prodi pendidikan, belajar menjalankan profesi kependidikan sebagaimana tujuan kurikulumnya. Oleh karena itu, kinerja mahasiswa selama mengikuti PPL juga merupakan sosok utuh dari berbagai bekal (matakuliah) yang dipelajari selama perkuliahan. PPL analog dengan kerja paktek. Melihat begitu sentralnya kedudukan PPL dalam perkuliahan prodi pendidikan di LPTK, maka sudah sewajarnya

PPL mendapat perhatian khusus di dalam proses pendidikan di FKIP Universitas HKBP Nomensen (UHN).

Kebijakan pemerintah yang secara langsung berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan di UHN adalah diberlakukannya UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, HELTS 2003-2010, dan pencanangan "Guru sebagai Profesi". Kebijakan ini harus disikapi dengan implementasi peningkatan kualitas institusi untuk dapat menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi yang dapat menjawab tantangan masa depan dan memenuhi tuntutan kebutuhan *stakeholder*. Untuk itu perlu dilakukan penataan kelembagaan yang relevan dengan tuntutan Undang-undang dan peraturan tersebut.

Didasari tuntutan Undang-undang dan peraturan di atas, kita sepakat bahwa 4 kompetensi utama (kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional) guru harus tertanam berakar, hidup, berbunga dan berbuah dari/dalam diri individu dan komunitas sivitas akademika (calon guru, guru/dosen) program studi pendidikan di UHN. Mari kita renungkan,

Aku hidup berilmu tapi kering dan gersang, karena aku tak punya sosial dan tak berkepribadian. Aku mampu mengelola dan mentransformasikan ilmu pengetahuan tetapi aku tak ikhlas, karena aku dianggap rendah. Aku menguasai dan menanamkan ilmu bagi mereka tapi tak berbuah, karena aku tak menjiwai dan membangkitkan potensi mereka. Aku bertauladan dan berbicara memimpin tapi aku dianggap "tong kosong nyaring bunyinya", karena aku tak berilmu dan tak memahami mereka. Apakah aku adalah guru yang diharapkan?

Berdasarkan refleksi di atas, seorang guru harus ikhlas dan benar mentransformasikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Guru yang

profesional adalah guru yang memiliki 4 kompetensi yang saling terkait dalam membelajarkan dan mengembangkan potensi peserta didik.

Kita perlu menyadari bahwa kondisi masyarakat Indonesia sangat heterogen. Hal itu berakibat kondisi pendidikannya juga sangat bervariasi. Kita sulit membandingkan SMP di Jakarta dengan SMP di Silau Dunia Kabupaten Simalungun. Bahkan sulit membandingkan SMA di kota Siantar dengan SMA di Samosir yang hanya berjarak ± 100 km. Mengapa demikian, karena memang tuntutan kompetensi, motivasi, imajinasi dan intuisi siswa, sarana/prasarana, masalah yang dirancang dari fakta dan lingkungan belajar siswa dimungkinkan berbeda. Tingkat sosial ekonomi dan apresiasi masyarakat juga berbeda. Di samping itu, kita harus memahami bahwa kemampuan dasar siswa kita juga beragam. Ada siswa yang memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata, tetapi juga cukup banyak siswa yang kemampuan intelektualnya di bawah rata-rata. Barangkali kurva normal dapat memudahkan kita untuk memahami kondisi tersebut. Oleh karena itu menganggap kondisi pendidikan di berbagai daerah di tanah air ini seragam dapat "menyesatkan". Implikasi dari keberagaman tersebut, kita juga harus mentoleransi keberagaman pola perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran serta hasil transformasi pendidikan.

Pendidikan juga harus menghadapi kenyataan bahwa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) berkembang sangat cepat, sehingga keadaan juga cepat berubah. Pengetahuan dan teknologi yang saat ini "in", bukan mustahil sudah menjadi usang dalam beberapa tahun mendatang. Perkembangan IPTEK juga membuahkan jenis pengetahuan yang sangat banyak ragamnya. Oleh karena itu seringkali para perancang kurikulum bingung mana yang harus diprioritaskan dalam pendidikan, karena waktu yang terbatas.

Menghadapi kondisi semacam itu, sebaiknya kita kembali ke prinsip dasar pendidikan, yaitu membantu peserta didik untuk mengembangkan potensinya untuk persiapan menghadapi masa depan. Jadi mata pelajaran adalah sarana untuk mengembangkan potensi anak dan bukan sebaliknya siswa yang dijadikan objek untuk "menelan" materi pelajaran. **Misalnya**, dalam bidang matematika yang selama ini dianggap abstrak saja, tujuan pendidikan matematika di tingkat dasar dinyatakan sebagai (1) mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan di dalam kehidupan, bertindak atas dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat, jujur, dan efektif, serta (2) dapat menggunakan matematika dan pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Jadi sangat jelas tujuan pendidikan matematika adalah mempersiapkan siswa menghadapi masa depan dengan menggunakan matematika sebagai bekalnya. Berarti, siswa dibelajarkan untuk menghadapi masa depan dan matematika sebagai alat.

Mencermati uraian di atas, diperlukan beberapa teorema, antara lain: (1) guru adalah orang yang pertama dan yang utama pengembang kurikulum, (2) kuasai materi agar dapat mengintervensi siswa belajar, dan (3) kuasai teori-teori pembelajaran agar dapat melibatkan siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Dalam hal ini, kompetensi pedagogik yang dimiliki seorang guru adalah suatu hal yang esensial. Kompetensi pedagogik yang dimaksud dalam makalah ini adalah kemampuan mengelola pembelajaran terkait pemahaman tentang peserta didik secara mendalam dan penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Pemahaman tentang peserta didik meliputi karakteristik siswa dan pemahaman tentang psikologi perkembangan siswa sedangkan pembelajaran yang mendidik meliputi kemampuan mengembangkan kurikulum, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran,

menilai proses dan hasil pembelajaran, serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Kurikulum merupakan komponen pendidikan yang cukup berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan pendidikan. Namun, kurikulum bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pendidikan, karena masih ada faktor lainnya, seperti guru, siswa, sarana dan prasarana pendidikan, manajemen sekolah, dan sistem pendidikan. Pemberdayaan sekolah sebagai ujung tombak pendidikan adalah hal yang sangat urgen untuk dilakukan. Apapun kebijakan yang dirancang di tingkat pusat maupun daerah terkait pengembangan kurikulum, pada akhirnya sekolah yang harus menerapkannya. Sesungguhnya pengembangan kurikulum harus bergerak *bottom up approach*, dimulai dari pengenalan karakteristik peserta didik dan kondisi sekolah yang nyatanya sangat heterogen sampai pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kesiapan menghadapi tantangan global. Pemberdayaan guru dan sekolah dalam pengembangan kurikulum adalah kata kunci keberhasilan proses pendidikan. Memang kurikulum nasional tetap diperlukan, tetapi sebaiknya hanya dalam garis besar dan sekolah diberi kesempatan untuk menjabarkan, sesuai kondisi masing-masing. Dengan demikian muatan lokal sudah tercakup di dalamnya. Muatan lokal tidak hanya berupa mata pelajaran khusus, tetapi dalam setiap mata pelajaran terdapat substansi muatan lokal, disamping yang berlaku secara nasional. Isi dan model pembelajaran biologi pada SMA di Jakarta tidak harus tepat sama dengan SMA di Parapat, karena kebutuhan siswanya berbeda dan situasi lingkungannya berbeda. Kita seringkali menyatakan KTSP jauh berbeda dengan kurikulum sebelumnya, KTSP hanya berisi aturan-aturan pokok saja, guru dan sekolah diberi wewenang yang luas untuk mengembangkannya. Namun, dalam prakteknya kurikulum minimal itu

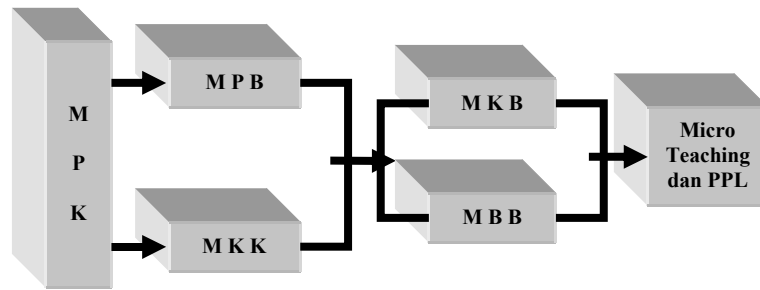
sudah jauh di atas kemampuan siswa, sehingga guru dan sekolah tidak mungkin menambah.

Uraian makalah ini terbatas pada pemaparan tentang (1) kedudukan PPL dalam kurikulum LPTK, (2) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), (3) Sinkronisasi Muatan Kurikulum LPTK dan KTSP di sekolah mitra PPL.

B. PEMBAHASAN

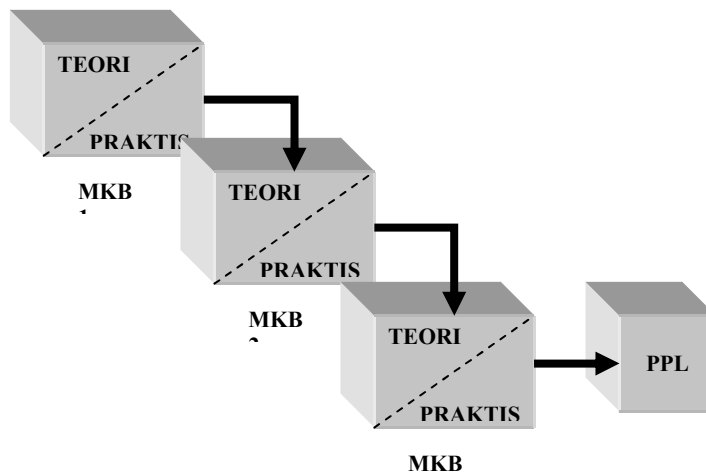
1. Kedudukan PPL dalam Kurikulum LPTK

Kurikulum Universitas (program studi pendidikan) sebagai acuan proses pendidikan dapat digambarkan dengan diagram alur pada Gambar-1. Dari gambar tersebut tampak bahwa sebagai landasan kurikulum adalah kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK). Di atasnya terdapat dua kelompok matakuliah, yaitu MPB (Matakuliah Perilaku Berkarya) dan MKK (Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan). MPB dimaksudkan sebagai bekal dasar bidang kependidikan, sedangkan MKK sebagai bekal bidang studi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Berdasarkan dua kelompok tersebut, mahasiswa belajar bagaimana mendidik dan mengajarkan bidang studi tersebut kepada peserta didik, yaitu melalui kelompok Matakuliah Keahlian Berkarya dan Berkehidupan Bermasyarakat (MKB dan MBB). Antara matakuliah lain dalam kelompok MKB dengan PPL sebenarnya merupakan satu kesatuan. Dalam MKB, misalnya strategi belajar, evaluasi dan sebagainya, mahasiswa belajar “bagian-bagian”, tetapi pada PPL mahasiswa belajar menggabungkan bagian-bagian tersebut secara utuh dan dalam bentuk nyata. Oleh karena itu sebaiknya antara MKB dengan PPL harus ada keterpaduan, baik secara konsep maupun pelaksanaannya.



Gambar-1: Kurikulum Universitas (LPTK) dalam Diagram Alur

Jika dalam MKB dipersepsi mahasiswa belajar bagian-bagian, yang nantinya akan dirakit dalam PPL, maka sebaiknya dalam MKB-pun mahasiswa juga sudah belajar dalam situasi “lapangan”. Misalnya, dalam matakuliah evaluasi pengajaran, mahasiswa sudah harus belajar menyusun soal dan instrumen evaluasi pembelajaran berdasarkan situasi sesungguhnya di sekolah. Dengan demikian dalam proses perkuliahan MKB, sudah harus ada bagian penugasan, di mana mahasiswa belajar hal-hal yang bersifat praktis, seperti tampak pada Gambar-2 berikut.



Gambar-2: Skema Alur MKB Secara Ideal

Meskipun sejak awal (MKB) mahasiswa program studi pendidikan sudah dikenalkan dengan situasi lapangan, PPL tetap masih sangat diperlukan. Dalam hal ini berfungsi sebagai latihan profesi secara utuh. Dalam PPL mahasiswa memperoleh kesempatan untuk menerapkan bekal sebelumnya dalam bentuk penerapan profesi kependidikan secara utuh. PPL semacam itu sebaiknya diletakkan pada bagian akhir dari program perkuliahan di Universitas (LPTK), karena: (1) untuk dapat ber-PPL diperlukan bekal yang cukup, baik dari MKK maupun MKB, dan (2) sebagai muara, program PPL harus merupakan sesuatu yang komprehensif. Dengan pola semacam itu, pola *step in* dan *step out* dapat berjalan dan diakhiri dengan suatu latihan profesi secara komprehensif dan memadai.

Keterlibatan pihak sekolah, sebenarnya tidak hanya dalam MKB dan PPL tetapi dalam keseluruhan pengembangan program kependidikan di LPTK, namun demikian, sesuai dengan sifatnya kontribusi sekolah dalam pembinaan MKB dan PPL perlu mendapat prioritas. Di samping itu masih ada peran penting yang perlu dilakukan oleh sekolah, yaitu sebagai *external evaluator* program pendidikan di LPTK. Hal ini sangat mendesak, karena selama ini dan sampai saat ini *external evaluation* sangat jarang atau dapat dikatakan hampir tidak pernah dilakukan perguruan tinggi, termasuk LPTK. Akibatnya perguruan tinggi sebagai penghasil lulusan berjalan sendiri dan pengguna lulusan (industri, sekolah, dan masyarakat) berjalan sendiri.

Pelaksanaan *external evaluation* sebenarnya dapat dilakukan secara simultan dengan PPL. Sebagai muara program pendidikan, sebenarnya kinerja mahasiswa selama ber-PPL dapat menggambarkan kualitas bekal yang dimiliki mahasiswa. Dengan demikian, melalui kegiatan PPL dapat dirancang evaluasi eksternal untuk mengetahui ketercapaian program

pendidikan di Universitas. Jika menggunakan paradigma Total Quality Management (TQM), maka penilaian pihak sekolah terhadap kinerja mahasiswa selama ber-PPL dapat dijadikan salah satu indikator utama dalam penilaian program pendidikan di Universitas.

2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah.

KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus.

Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Pengembangan KTSP mengacu pada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan berpedoman pada panduan penyusunan

kurikulum yang disusun oleh BSNP, serta memperhatikan pertimbangan komite sekolah/madrasah. Penyusunan KTSP untuk pendidikan khusus dikoordinasi dan disupervisi oleh dinas pendidikan provinsi, dan berpedoman pada SI dan SKL serta panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP.

KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya.
- b. Beragam dan terpadu
- c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan
- e. Menyeluruh dan berkesinambungan
- f. Belajar sepanjang hayat
- g. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah

Komponen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

a. Tujuan Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan

Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan berikut.

- 1) Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- 2) Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

- 3) Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

b. Struktur dan Muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tertuang dalam SI meliputi lima kelompok mata pelajaran sebagai berikut.

- (1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia
- (2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian
- (3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi
- (4) Kelompok mata pelajaran estetika
- (5) Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan

Kelompok mata pelajaran tersebut dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan pembelajaran sebagaimana diuraikan dalam PP 19/2005 Pasal 7.

Muatan KTSP meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan. Di samping itu materi muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri termasuk ke dalam isi kurikulum.

1) Mata pelajaran

Mata pelajaran beserta alokasi waktu untuk masing-masing tingkat satuan pendidikan berpedoman pada struktur kurikulum yang tercantum dalam SI.

2) Muatan Lokal

Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak sesuai menjadi

- 40 Dr. Bornok Sinaga, M.Pd. adalah dosen jurusan Matematika FMIPA UNIMED

bagian dari mata pelajaran lain dan atau terlalu banyak sehingga harus menjadi mata pelajaran tersendiri. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan, tidak terbatas pada mata pelajaran keterampilan. Muatan lokal merupakan mata pelajaran, sehingga satuan pendidikan harus mengembangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk setiap jenis muatan lokal yang diselenggarakan. Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan satu mata pelajaran muatan lokal setiap semester. Ini berarti bahwa dalam satu tahun satuan pendidikan dapat menyelenggarakan dua mata pelajaran muatan lokal.

3) Kegiatan Pengembangan Diri

Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan/atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dapat dilakukan antara lain melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karier peserta didik serta kegiatan keparamukaan, kepemimpinan, dan kelompok ilmiah remaja.

Khusus untuk sekolah menengah kejuruan pengembangan diri terutama ditujukan untuk pengembangan kreativitas dan bimbingan karier.

Pengembangan diri untuk satuan pendidikan khusus menekankan pada peningkatan kecakapan hidup dan kemandirian sesuai dengan kebutuhan khusus peserta didik.

Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran. Penilaian kegiatan pengembangan diri dilakukan secara kualitatif, tidak kuantitatif seperti pada mata pelajaran.

4) Pengaturan Beban Belajar

- a) Beban belajar dalam sistem paket digunakan oleh tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB baik kategori standar maupun mandiri, SMA/MA/SMALB /SMK/MAK kategori standar. Beban belajar dalam sistem kredit semester (SKS) dapat digunakan oleh SMP/MTs/SMPLB kategori mandiri, dan oleh SMA/MA/SMALB/SMK/MAK kategori standar.

Beban belajar dalam sistem kredit semester (SKS) digunakan oleh SMA/MA/SMALB/SMK/MAK kategori mandiri.

- b) Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran pada sistem paket dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Pengaturan alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran yang terdapat pada semester ganjil dan genap dalam satu tahun ajaran dapat dilakukan secara fleksibel dengan jumlah beban belajar yang tetap. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. Pemanfaatan jam pembelajaran tambahan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi, di samping dimanfaatkan untuk mata pelajaran lain yang dianggap penting dan tidak terdapat di dalam struktur kurikulum yang tercantum di dalam Standar Isi.
- c) Alokasi waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur dalam sistem paket untuk SD/MI/SDLB 0% - 40%, SMP/MTs/SMPLB 0% - 50% dan SMA/MA/SMALB/SMK/MAK 0%-60% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan. Pemanfaatan alokasi waktu

tersebut mempertimbangkan potensi dan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi.

- d) Alokasi waktu untuk praktik, dua jam kegiatan praktik di sekolah setara dengan satu jam tatap muka. Empat jam praktik di luar sekolah setara dengan satu jam tatap muka.
- e) Alokasi waktu untuk tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur untuk SMP/MTs dan SMA/MA/SMK/MAK yang menggunakan sistem SKS mengikuti aturan sebagai berikut.
 - (1) Satu SKS pada SMP/MTs terdiri atas: 40 menit tatap muka, 20 menit kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur.
 - (2) Satu SKS pada SMA/MA/SMK/MAK terdiri atas: 45 menit tatap muka, 25 menit kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur.

5) Ketuntasan Belajar

Ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu kompetensi dasar berkisar antara 0-100%. Kriteria ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator 75%. Satuan pendidikan harus menentukan kriteria ketuntasan minimal dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik serta kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran. Satuan pendidikan diharapkan meningkatkan kriteria ketuntasan belajar secara terus menerus untuk mencapai kriteria ketuntasan ideal.

6) Kenaikan Kelas dan Kelulusan

Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun ajaran. Kriteria kenaikan kelas diatur oleh masing-masing direktorat teknis terkait. Sesuai dengan ketentuan PP 19/2005 Pasal 72 Ayat (1), peserta didik

dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah:

- a) menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
- b) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan;
- c) lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- d) lulus Ujian Nasional.

7) Penjurusan

Penjurusan dilakukan pada kelas XI dan XII di SMA/MA. Kriteria penjurusan diatur oleh direktorat teknis terkait.

8) Pendidikan Kecakapan Hidup

- a) Kurikulum untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup, yang mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik dan/atau kecakapan vokasional.
- b) Pendidikan kecakapan hidup dapat merupakan bagian integral dari pendidikan semua mata pelajaran dan/atau berupa paket/modul yang direncanakan secara khusus.
- c) Pendidikan kecakapan hidup dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan dan/atau dari satuan pendidikan formal lain dan/atau nonformal.

9) Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global

- a) Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global adalah pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dan kebutuhan

daya saing global dalam aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain, yang semuanya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik.

- b) Kurikulum untuk semua tingkat satuan pendidikan dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global.
- c) Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global dapat merupakan bagian dari semua mata pelajaran dan juga dapat menjadi mata pelajaran muatan lokal.
- d) Pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan formal lain dan/atau nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.

c. Kalender Pendidikan

Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat, dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana yang dimuat dalam Standar Isi.

3. Sinkronisasi Muatan Kurikulum LPTK dan KTSP di Sekolah Mitra PPL

Secara garis besar kurikulum memuat 4 komponen, yaitu Goal (kompetensi), subject matter, method and organization, evaluation). Mahasiswa PPL untuk masing-masing bidang studi bertugas mengembangkan komponen kurikulum sehingga sesuai dengan perkembangan IPTEK, kebutuhan stakeholder dan pasar kerja. Pengembangan komponen kurikulum tersebut harus mengacu pada prinsip-prinsip pengembangan KTSP yang telah diungkap sebelumnya.

Misalnya, implementasi KTSP menuntut guru dan calon guru menerapkan paradigma baru pembelajaran yang berbasis paham konstruktivis dan budaya lokal. Para guru harus berupaya mengangkat berbagai masalah yang bersumber dari fakta dan lingkungan budaya siswa sebagai bahan inspirasi dalam mengonstruksi berbagai konsep dan prinsip ilmu pengetahuan yang dipelajari. Dalam pemecahan masalah tersebut, guru dan calon guru harus merancang dan menerapkan pola interaksi sosial yang dipahami siswa sebagai pola iteraksi edukatif serta menanamkan nilai-nilai budaya dalam memotivasi siswa belajar.

Sesungguhnya rumpun matakuliah pada kurikulum LPTK sejalan dengan rumpun mata pelajaran dalam KTSP di sekolah. Hal ini dapat dicermati pada prinsip isi dan kompetensi yang tertangkap dari 5 rumpun mata kuliah dan 5 rumpun mata pelajaran yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1: Sinkronisasi Rumpun Matakuliah dan Mata Pelajaran

No.	5 Rumpun Mata Kuliah di LPTK	5 Rumpun Mata Pelajaran Pada KTSP
1.	Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)	Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia
2.	Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB)	Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian
3.	Matakuliah Keterampilan Keilmuan (MKK)	Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi
4.	Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB)	Kelompok mata pelajaran estetika.
5.	Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)	Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan

Dalam kerja praktek (PPL) di sekolah, kompetensi mahasiswa yang terbentuk dari hasil pembelajaran 5 rumpun matakuliah tersebut diejawantahkan secara terintegratif dalam membelajarkan siswa. Mata pelajaran adalah sebuah wahana (kendaraan atau alat) yang digunakan

guru untuk membentuk dan mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik.

Penguasaan keluasan atas materi ajar ditunjukkan oleh indikator pemahaman dan penguasaan atas struktur pengetahuan sesuai dengan bidang studinya. Hal ini akan menjadi kekuatan guru dalam mengapresiasi penguasaan materi pelajaran untuk dikreasikan, disusun, dan dihubungkan dengan mata pelajaran lain dalam rumpun bidang studi. Dengan kata lain, penguasaan atas keluasan materi ajar ditunjukkan oleh dua indikator utama, yaitu memahami dan menguasai struktur ilmu pengetahuan, serta memahami dan menguasai struktur organisasi materi dalam kurikulum bidang studi. Identifikasi atas kemampuan ini dapat dilakukan melalui proses dan hasil analisis kurikulum yang dilakukan oleh guru pada setiap kegiatan pembelajaran. Merrill (1983) mengajukan matriks analisis kedalaman dan keluasan materi ajar sebagai berikut.

Tabel 2: Matriks Analisis Keluasan dan Kedalaman Materi Model Merrill

KOMPE TENSI	CONTENT/ISI		KINERJA/KEMAMPUAN/KETE RAMPILAN		
	Bhn Kajian	Karakteristik	Intelektual	Motorik	Filosofis
Kompetensi dasar atau sub-kompetensi (indikator-indikator)	A	fakta konsep prinsip prosedur	mengingat penalaran/komunikasi pemecahan masalah	peniruan modifikasi kerja kompleks	aksiologi epistemologi ontologi
	B	fakta konsep prinsip prosedur	mengingat penalaran/komunikasi pemecahan masalah	peniruan modifikasi kerja kompleks	aksiologi epistemologi ontologi
	C	fakta konsep prinsip prosedur	mengingat penalaran/komunikasi pemecahan masalah	peniruan modifikasi kerja kompleks	aksiologi epistemologi ontologi

Sekuensial materi ajar akan memperlihatkan tingkat kedalaman dan penguasaan guru atas materi ajar, hal ini diperlihatkan dalam sistematika organisasi serta sinkronisasi antar substansi kajian atau mata pelajaran. Indikasi lain atas penguasaan dan kedalaman materi ajar guru tercermin pada kesesuaian dan ketepatan penentuan karakteristik setiap substansi kajian. Dalam hal ini, karakteristik substansi kajian mencakup: faktual, konsep, prinsip, prosedur, hubungan antar personal, serta sikap atau kecenderungan. Penguasaan atas landasan filosofis munculnya suatu substansi kajian. Hal ini penting bagi seorang guru. Pertanyaan mendasar berkenaan dengan hal ini adalah mengapa suatu substansi itu ada dan perlu dipelajari. Menguasai hakekat, asal-usul dan kegunaan suatu substansi kajian memainkan peranan penting guna memperlihatkan kekuatan materi tersebut. Penguasaan atas kedalaman materi dapat diidentifikasi melalui kemampuan guru dalam menyusun sekuensial substansi kajian, penetapan karakteristik materi, dan penguasaan atas landasan filosofis setiap substansi kajian atau mata pelajaran.

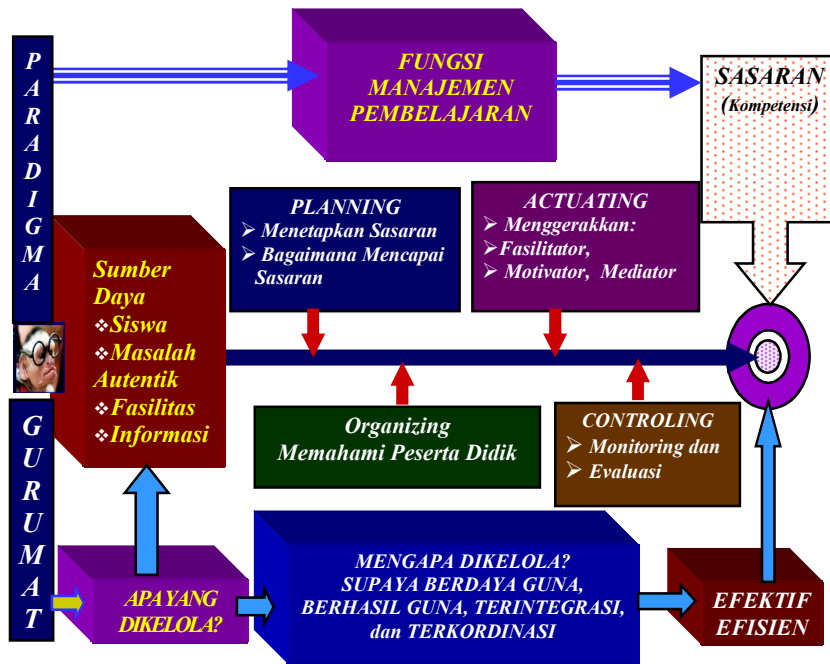
Untuk kebutuhan pembelajaran yang efektif, guru dan calon guru harus mengenali karakteristik siswa dan lingkungannya. Di samping itu, para guru harus mengenali dan menerapkan berbagai model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik ilmu yang diajarkan dan kompetensi yang akan dicapai oleh siswa. Sesungguhnya tidak ada tanah yang tidak baik, yang menjadi pertanyaan adalah tanaman apa yang cocok tumbuh dan berkembang di tanah tersebut. Otak dan jiwa siswa adalah “sawah” bagi guru dan berbagai jenis ilmu pengetahuan adalah ragam tanaman yang akan disemaikan oleh guru pada anak. Ilmu pengetahuan yang dimiliki peserta didik akan tumbuh dan berkembang membentuk intelektual, psikomotor dan sikap, apabila guru berupaya memandirikan dan menyadarkan anak terhadap seluruh aktivitas belajarnya.

Pendidikan dan pengajaran pada intinya merupakan upaya melanjutkan kegiatan melahirkan anak. Berbeda dengan hewan, anak manusia dilahirkan dalam keadaan serba tidak berdaya. Seekor anak itik - begitu diletas - dapat ke sana ke mari, mulai mengais dan mencari makanannya sendiri. Tidak demikian anak manusia. Ia membutuhkan manusia lain untuk bertahan hidup dan lebih lagi untuk mengembangkan hidup. Oleh karena itu manusia didefinisikan sebagai *animal educandum*, hewan yang harus dididik. Tanpa pendidikan manusia tidak dapat bertahan hidup dan tidak dapat mengembangkan hidupnya. Oleh sebab itu, segala upaya pendidikan dan pengajaran harus ada dalam kerangka membantu manusia bertahan hidup dan mengembangkan hidupnya.

Kemampuan yang diperlukan agar seseorang dapat bertahan hidup dengan sukses (sebagai pribadi, sebagai hamba Tuhan, sebagai anggota masyarakat) itulah yang disebut dengan kecakapan hidup (*life skill*). Beberapa ahli mendefinisikan kecakapan hidup sebagai kemampuan untuk menghadapi problema kehidupan, kemudian secara proaktif mengatasinya secara arif dan kreatif (Depdiknas, 2004). Definisi ini bertolak dari asumsi bahwa dalam kehidupan kita selalu dihadapkan dengan masalah, karena masalah adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Masalah itulah yang harus diantisipasi dan diselesaikan secara arif dan kreatif. Kita akan sukses, jika mampu secara kreatif mengubah masalah menjadi peluang. Oleh karena itu, kecakapan hidup itulah yang seharusnya menjadi orientasi pendidikan. Dengan cara itu, siswa yang telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, dapat menggunakannya untuk menghadapi kehidupan nyata di lapangan.

Guru adalah seorang pemimpin yang memiliki paradigma dalam memandang berbagai masalah dan kebutuhan siswanya. Ia menerapkan 4 fungsi manajemen dalam mengelola pembelajaran di kelasnya. Berbagai sumberdaya yang dimiliki harus dikelola agar berdaya guna, berhasil guna

dan terintegrasi dalam mencapai sasaran pembelajaran secara efektif dan efisien. Pengelolaan pembelajaran dari seorang guru profesional dapat dicermati pada skema berikut.



Gambar-3: Manajemen Pembelajaran di Kelas

C. PENUTUP

PPL adalah suatu kesempatan bagi mahasiswa berlatih membentuk profesi kependidikan secara nyata dan utuh. Konsekuensinya, mahasiswa harus menguasai dan mengimplementasikan 4 kompetensi guru yang saling terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Secara khusus, kompetensi profesional dan pedagogik yang dimiliki guru atau calon guru adalah katalisator pembangkitan potensi dan motivasi belajar peserta didik.

Mahasiswa sebagai calon guru dapat mengantisipasi berbagai perbedaan kurikulum, proses dan kebutuhan pendidikan di sekolah (ataupun daerah) melalui pengenalan karakteristik anak dan lingkungannya. Antisipasi ini dapat dilakukan lebih baik dengan menerapkan prinsip bahwa (1) guru adalah orang pertama dan yang utama pengembang kurikulum, (2) mata pelajaran adalah kendaraan dalam mengembangkan kemampuan, keterampilan, kecerdasan dan kepribadian anak didik, (3) kuasailah materi agar dapat mengintervensi siswa belajar dan kuasailah teori-teori pembelajaran agar dapat melibatkan siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.

Dosen harus mampu membentuk dan mengukur secara nyata dan utuh kompetensi yang dimiliki mahasiswa (calon guru) melalui PPL. Dosen harus mendampingi mahasiswa mengatasi dan menemukan solusi alternatif masalah-masalah pembelajaran. Di samping itu, dosen harus memiliki dan mengembangkan instrumen penilaian RPP, lembar observasi kemampuan guru mengelola pembelajaran, lembar observasi aktivitas siswa dan guru, tes-tes standar yang akan digunakan untuk mengukur keahlian berkarya dan wawasan/keterampilan keilmuan mahasiswa peserta PPL.

Masalah pendidikan adalah masalah kita bersama terutama bagi guru dan dosen. Meskipun agak utopia, tetapi kita perlu yakin bahwa pada saat keadaan ekonomi masyarakat cukup baik nanti dan komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas pendidikan semakin kuat, pendidikan akan tumbuh menjadi “layanan jasa” yang cukup prospektif. Ketika masyarakat sudah merasa cukup kebutuhan pangan, sandang, dan papan, maka pendidikan anak akan menyusul sebagai *kebutuhan dasar*. Jika hal itu sudah terjadi, orangtua akan rela membayar cukup mahal, asal yakin anaknya memperoleh pendidikan yang baik.

D. DAFTAR BACAAN

- Australian National Training Authority's (2003). *Animal Care & Management Training Package*, ANTA.
- Anonim. (2003) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem pendidikan Nasional*, Jakarta: Ditjen Dikdasmen.
- _____. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Ditjen Dikdasmen.
- Evans, Rupert N. (1974). *Foundation of Vocational Education*. Colombus Ohio: Charles E Merrill Publishing Co.
- Gaspersz, V. 2001. *ISO 9001:2000 and Continual Quality Improvement*. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: SEKOLAH. Gramedia Pustaka Utama.
- Hoogveld, A.W.M. (2003). *Teacher as Designer of Competency-Based Education*, Thesis, Open Universiteit Nederland
- Levesque, K. et.al (2000). *Vocational Education in the United States: Toward the year 2000* (Report No.029), Washington. D.C: U.S. Department of Education, Office of Educational Research and Improvement
- McKee, S. (2003). *Demystifying the Competency Conundrum*, Salt Lake City
- Nikijuluw, V.P.H. 2002. *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. Ko-Manajemen: Rezim Desentralisasi*. Jakarta: Pusat Pemberayaan dan Pembangunan Regional (P3R) dan SEKOLAH. Pustaka Cidesindo.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
- Permendiknas Nomor 18 tahun 2007 yang direvisi menjadi Permendiknas Nomor 11 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.
- Plomp, Tjeerd., (1997). *Educational and training system design*. Enschede, The Netherlands: Univercity of Twente.
- Pratiknya, Iwan. (1993). *Beberapa pemikiran dalam rangka pengembangan sumber daya manusia pada PJP II*. Makalah pada Seminar Pendidikan dan Pengembangan Kewirausahaan dalam Meningkatkan Kualitas SDM – ISPI Jawa Timur Tanggal 15 Juli 1995.
- Salis, E. (1993). *Total Quality Management in Education*, Kogan Page, Philadelphia.
- Sinaga, Bornok. (2007). *Pengembangan model pembelajaran matematika berdasarkan masalah berbasis budaya Batak. (Disertasi)*. Surabaya: PPs UNESA Surabaya.

- Sinaga, Bornok. (1999). *Efektifitas model pembelajaran berdasarkan masalah (Problem-Based Instruction) Pada Kelas I SMU dengan bahan kajian fungsi kuadrat. (Tesis)*. Surabaya: PPs IKIP Surabaya.
- Silberman, Mel. (1996). *Active learning*. Needham Heights, Massachusetts: Allyn and Bacon.
- Skemp, Richard R. (1982). *The psychology of learning mathematics*. London: Penguin Books Ltd.
- Slavin, Robert, E. (1994). *Educational psychology, theories and practice*. Fourth Edition. Massachusetts: Allyn and Bacon Publishers.
- Solso, R. L. (1995). *Cognitive psychology*. Washington. DC: Winston: The Loyola Symposium.
- Schmidt, W. et.al. (1996). *Characterizing pedagogical flow*, Boston, Kluwer Academic Publishers
- Syawal, G. (Ed.). (2004). *Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi di Sekolah*. Medan. Unimed Press, (in press).
- Tilaar, H.A.R. (Ed.). (2004). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cisekolaha.
- Torshen, K.Y. (1977), *The Mastery Approach to Competency-Based Education*, Academic Press, New York
- Vorhess, R.A. (2001). *Measuring what matters: Competency-based models in higher education*, NCES Network Conf. , Washington
- Whitaker, U. (1989). *Assessing Learning*, CAEL, Philadelphia